

# ISLAM DAN DEMOKRASI DARI ERA TAHTAWI HINGGA GHANNOUCHI

Maftuh

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia  
E-mail: maftuh10@gmail.com

**Abstract:** This research was conducted to examine the history of debate among Muslim intellectuals about Islam and democracy from the Tahtawi to Gannouchi eras, and its relevance to contemporary Islamic movements in parts of the Arab world. A long discussion of Azzam Tamimi's writings on the relationship between Islam and democracy, with a historical approach, leads to a conclusion. In the Islamic tradition, there are at least two major variants, namely fundamentalist and modernist groups. Fundamentalist groups are generally more rigid when adapting democracy to Islam, even shifting towards radicalism; while modernists are more adaptative in accepting democratic discourse. The results of this study can take an understanding that the concepts discussed by the characters. From the Tahtawi era to Gannouchi, it has had a distinct significance in the contribution of discourse between Islam and democracy. These concepts have clearly contributed to or input in the link between Islam and democracy. Although, some figures appear to be taking careful steps in explaining their ideas, so as not to be followed by Western democratic thinking which is rather free.

**Keyword:** Islamic Democratic, Contemporary Islamic movement

## Pendahuluan

Tema demokrasi adalah salah satu tema yang sampai saat ini masih menarik untuk didiskusikan. Berbagai karya yang mengulas tentang demokrasi telah dihasilkan—baik itu oleh para pemikir Islam maupun Barat. Semenjak kedatangan bangsa Barat ke dunia Islam, dan seiring dengan kemajuan bangsa Barat saat ini, maka sesuatu yang datang dari Barat selalu dijadikan indikator simbol kemajuan. Atas klaim itu, banyak negara merasa penting untuk “mencontoh”— baik

secara langsung atau tidak—segala bentuk kemajuan yang pernah dicapai oleh Barat—termasuk di dalamnya tema demokrasi.

Perdebatan hubungan antara Islam dan demokrasi selain menjadi salah satu kajian utama dari pemikiran politik Islam kontemporer, juga telah menjadi topik diskusi yang populer dalam media dan kalangan politisi di seluruh dunia. Topik ini tidak hanya dibahas di kalangan elite, mayoritas umat Islam yang masih awam pun banyak terlibat dalam perdebatan tentang hal ini.

Islam, yang mengajarkan kepada penganutnya tentang keimanan, ritual peribadahan, seperangkat pedoman tentang etika, moralitas dan pandangan hidup, harus selalu berperan dalam memecahkan setiap masalah yang berkembang. Itulah sebabnya umat Islam dituntut untuk memahami posisi Islam atas demokrasi dan nilai-nilai lainnya yang terkait dengan bangsa Eropa atau bangsa Barat. Penelitian ini akan berusaha untuk melacak sejarah perdebatan para intelektual muslim tentang Islam dan demokrasi dari era Tahtawi hingga Gannouchi, dan relevansinya dengan gerakan Islam kontemporer di belahan dunia Arab.

### **Revivalisme**

Pergerakan dunia Modern Islam di Timur Tengah, dalam bentuk gerakan politik yang menyatakan Islam sebagai dasar pemikiran, menemukan puncaknya dalam abad ke-18 yang dipengaruhi oleh pergerakan Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1115-1206 H / 1703-1791 M) dengan gerakan revivalisme Islam-nya. Dalam perkembangannya, revivalisme berorientasi pada gerakan pemurnian Islam dari bid'ah, khurafat, tahayyul dan seruan kembali pada al-Qur'an dan Hadith.

Gerakan modernisasi Islam juga dipengaruhi oleh upaya gerakan revivalisme lainnya pada abad ke-18; yang pertama di Sub-benua India yang dipimpin oleh Shah Wali Allah al-Dahlawi (1114-1176 H / 1703-1762 M) dan yang kedua di Afrika Barat yang dipimpin oleh Uthman bin Fudi (Dikenal juga sebagai Osoman Dan Fodio) (1168-1232 H / 1754-1817 M).

Berbeda dengan gerakan revivalisme di Arab yang menentang ajaran Sufi. Gerakan revivalisme di India dan Afrika justru muncul dari dalam tradisi Sufi yang sudah mapan. Dalam kasus pertama tasawwuf dianggap musuh, sementara di sisi lain tasawwuf dipakai alat kendaraan dari reformasi itu sendiri. Meskipun ketiga gerakan revivalisme tersebut memiliki perbedaan yang cukup mencolok, tetapi

ketiganya memiliki satu kesamaan. Yakni, berusaha untuk mereformasi Islam dari dalam demi menghadapi tantangan yang semakin berkembang. Dalam penilaian mereka, penyimpangan ajaran Islam yang benar serta hilangnya keimanan yang monoteistik adalah penyebab utama kemunduran dan keterbelakangan bagi umat Islam.

Perhatian Ibn Abd al-Wahhab ditujukan untuk melawan bentuk semi-Paganis yang telah menyimpang dari ajaran Islam dan telah banyak dipraktikkan oleh kaum muslim saat itu, sementara kekhawatiran al-Dahlawi untuk melindungi Islam di India terhadap pengaruh agama Hindu yang sangat dominan, sedangkan perjuangan bin Fudi adalah bertujuan menyelamatkan Islam di Afrika dari gangguan pengaruh animisme.

Bagi Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, politik dianggap penting bila berdampak pada misi perjuangannya. Pertama, supaya gerakan ia tentang pemurnian aqidah tidak terhambat. Kedua, untuk mendapatkan bantuan dari penguasa. Ia sendiri tampaknya tidak memiliki ambisi politik dan tidak menunjukkan minat pada pemerintahan. Tulisan-tulisan yang ditinggalkannya pun tidak terkait dengan teori-teori politik. Tapi lebih pada ajaran monoteisme murni dan kehidupan Nabi Muhammad sebagai panutan bagi seorang muslim. Namun demikian, gerakan pembaharuan yang dimunculkan oleh Ibn Abd al-Wahhab menjadi embrio dari gerakan revolusi melawan segala sesuatu yang dianggap tidak Islami, termasuk praktik-praktik politik pada suatu negara, yang didokumentasikan sejak generasi pertama Islam.<sup>1</sup>

### **Tantangan Bangsa Eropa pada Dunia Timur**

Penaklukan bangsa Eropa terhadap beberapa negara di teritorial Islam menjadi penyebab kemunduran bangsa Arab dan Islam. Menurut kelompok Wahabi di Saudi Arabia yang nyaris tidak

---

<sup>1</sup> Pada tahun 1787, Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb wafat, namun ajaran-ajarannya tetap hidup dengan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahabi. Lih. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bulan Bintang, 1975), 26. dan oleh Gibb disebutnya dengan “Gerakan Wahabi”. “Gerakan Wahabi” bukan merupakan nama yang diberikan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb, melainkan oleh golongan lain yang menjadi lawan-lawannya dan orang-orang Eropa. Para pengikut Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb sendiri menamakan dirinya sebagai kaum “Muhammadin” atau “Unitarian”, yaitu orang-orang yang berusaha mengesakan Tuhan semurni-murninya. Lih. H.A.R. Gibb & J.H. Kramers, (Eds.). 1953. *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: B.J. Brill., 1953), 618.

pernah kontak dengan bangsa Eropa, penyebab kemunduran umat Islam adalah penyimpangan mereka dari ajaran Islam yang benar. Bagi kelompok Wahabi, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengembalikan kemurnian tauhid dan membersihkan Islam dari ritual politeistik dan penambahan-penambahan yang tidak benar (*bid'ah*).

Meskipun demikian, beberapa reformis, terutama di Mesir abad ke-19, memilih untuk melihat dari sisi yang lain. Bahwa, pertemuan bangsa Arab dan Islam dengan bangsa Eropa telah memberikan kontribusi besar. Menurut Muhammad Ali, penguasa Mesir saat itu, tanpa disadari oleh kalangan intelektual Mesir dan dunia Arab, kemunduran yang dialami oleh umat Islam terjadi seiring dengan kemajuan yang dialami oleh bangsa Eropa. Muhammad Ali menginginkan untuk mengimpor kemajuan-kemajuan dari bangsa Eropa yang sangat dibutuhkan di Mesir, melalui pengiriman mahasiswa dan profesional untuk belajar ke Perancis.

Salah satu sahabat dekat Muhammad Ali adalah Sheikh Hasan al-Attar (1766-1835). ketika Napoleon Bonaparte dan pasukannya menjajah Mesir. Hasan al-Attar yang kala itu berumur 32 tahun, bersama ulama-ulama lain mengasingkan diri (baca: mengamankan diri) di sebuah tempat selama 18 bulan. Ketika keadaan dirasa aman, barulah Hasan al-Attar kembali ke Kairo dan berkenalan dengan beberapa ilmuwan terkemuka dan intelektual yang menemani Napoleon. Ia belajar dari mereka tentang ilmu pengetahuan dan mengajari mereka bahasa Arab. Sejak saat itu dan seterusnya al Attar mengikuti arus modernisasi dan memproklamkan slogan '*Our countries must change their conditions and acquire the sciences unavailable to them yet*'.

Menurut al-Attar, umat Islam harus mengejar ketinggalan dengan mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan bangsa Eropa hingga bisa menaklukkan banyak negara lain. Oleh Muhammad Ali, sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat kekuasaan, ia mulai membatasi pengaruh peran ulama al-azhar di bidang politik dan ekonomi. Tidak hanya itu, ia juga meyakini bahwa selain menjadi halangan untuk misi modernisasi, para ulama al-azhar juga berpotensi untuk menantang otoritasnya. Ini mungkin menjadi langkah awal dalam perjalanan ke 'sekularisasi'.

Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1873) lahir di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Ia

merupakan murid dan pengikut setia al-Attar yang ditugaskan oleh Muhammad Ali sebagai mursyid dan imam tentara militer yang dikirim untuk belajar militer dan menguasai teknologi militer modern ke negara Perancis.

Oleh ulama di kalangan al-Azhar, Tahtawi diharapkan mampu mengemban misinya di Perancis. Tahtawi diminta untuk mengamati pengalamannya di Perancis dan mencatatnya. Tahtawi pun belajar dengan sungguh-sungguh. Ia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan buku-buku sejarah kuno, filsafat dan mitologi Yunani, geografi, aritmatika dan logika yang ditulis dengan bahasa Perancis dan yang paling penting, Ia pun mampu mempelajari karya-karya pemikir Perancis abad ke-18 seperti Voltaire dan Rousseau.

Kembali ke kampung halaman, Tahtawi tak mampu berbuat banyak selain mengekspresikan kekaguman dengan capaian negara Perancis pasca-revolusi. Dengan mengesampingkan apa yang telah diperbuat oleh negara Perancis di Aljazair yang wilayahnya telah berubah menjadi puing-puing<sup>2</sup>, oleh banyak kalangan di Mesir, kekaguman yang dialami Tahtawi sama sekali bukan kekaguman buta. Pengalaman Tahtawi selama di Perancis memungkinkannya untuk mendiagnosa penyakit yang dialami umat Islam dan menemukan resep obatnya.

Dalam analisis Tahtawi, masalah yang ada di negara Mesir muncul hanya karena kurangnya kebebasan. Ia menyarankan perlunya demokrasi multi partai sebagai terapi. Inilah yang menjadikan ia diakui oleh para tokoh demokrasi Arab sebagai bapak demokrasi Mesir di kemudian hari<sup>3</sup>, ia dianggap sebagai sarjana Islam pertama yang mengkampanyekan interaksi dengan peradaban Eropa selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *Shari'ah* Islam. Bahkan mengkritik orang-orang yang menentang idenya untuk mengambil pengetahuan dari Eropa. Ia menyatakan.

*For civilizations are turns and phases. These sciences were once Islamic when we were at the zenith of our civilization. Europe took them from us*

---

<sup>2</sup>Abdelwahab Elmessiri, 'Ma'alim al-Khitab al-Islamiy al-Jadid' (Features of New Islamic Discourse), in Azzam Tamimi (ed.) *Al-Sbariyah al-Siyasiyah fi al-Islam Masadiruha wa Dawabituha* (Political Legitimacy in Islam its Sources and Guidelines). (London: Liberty for Muslim World Publications, 1997), 171-172

<sup>3</sup> Ahmad Sudqi al- Dajani, 'Ta'awur Mafahim al-Dimuqratiyah Fi al-Fikr al-'Arabi al-Hadith' (The Development of the Concepts of Democracy in the Modern Arab Thought), in *Azmat al-Dimuqratiyah Fi al-Watan al-'Arabi* (The Crisis of Democracy in the Arab Homeland). (Beirut: Arab Unity Studies Centre, 1984), 121

*and developed them further. It is now our duty to learn from them just as they learned from our ancestors*<sup>4</sup>

Pada tahun 1834, tak lama setelah ia kembali ke Kairo dari Paris, ia menerbitkan Bukunya yang pertama dengan judul *Takhlis al-Ibriz Ila Talkhis Bariz* (Extracting Gold in Telling the News from Paris). Buku ini merangkum pengamatannya tentang peradaban modern di Perancis<sup>5</sup>. Di dalamnya ia memuji konsep demokrasi di Perancis dan bagaimana mempertahankan demokrasi, melalui revolusi Perancis tahun 1830 melawan Raja Charles X<sup>6</sup>. Ia mencoba untuk menjelaskan kepada pembacanya bahwa konsep demokrasi adalah selaras dengan Islam. ia menganalogikan pluralisme politik dengan pluralisme ideologi serta madzhab-madzhab yang ada dalam ajaran Islam:

*Religious freedom is the freedom of belief, of opinion and of sect, provided it does not contradict the fundamentals of religion. An example would be the theological opinions of the Al-Asba'irah and the Al-Maturidiyah; another would be the opinions of leading jurists within the doctrine of the branches. For by following any one of these schools, a human feels secure. The same would apply to the freedom of political practice and opinion by leading administrators, who endeavor to interpret and apply rules and provisions in accordance with the laws of their own countries. Kings and ministers are licensed in the realm of politics to pursue various routes that in the end serve one purpose: good administration and justice.*<sup>7</sup>

Sejak saat itu, hampir semua reformis Islam pada abad ke-19 di berbagai teritorial Islam mengambil isu reformasi politik sebagai prasyarat untuk bangkit dari kemunduran dan melawan keterbelakangan. Pemikiran Tahtawi inilah yang semakin memperjelas bahwa 'despotisme' adalah sumber utama dari penyakit umat Islam. Dan juga, memperjelas bahwa obatnya tidak dapat ditemukan dalam budaya masyarakat Muslim saja, tapi harus dicari di tempat lain juga, khususnya di Eropa.

Tonggak penting dalam pemikiran demokrasi bangsa Arab adalah kontribusi dari Khayr al-din al-Tunisi (1810-1899), pemimpin

---

<sup>4</sup> Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 34

<sup>5</sup> *Ibid*, 70-71

<sup>6</sup> Ahmad Sudqi al-Dajani, "Tatawur Mafahim al-Dimuqratiyah .... 121

<sup>7</sup> Faruq Abd al-Salam, *Al-Abḥab al-Siyasiyah Fi al-Islam* (Political Parties in Islam). (Cairo: Qalyub Publishing House, 1978), 27

gerakan reformasi abad ke-19 di Tunisia dan penulis *Aqwam al-Masalik Fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik* (*The Most Straight Path to Knowing the Conditions of Nations*). Buku ini mencoba menjelaskan tentang reformasi politik di dunia Arab. Al-Tunisi memperingatkan masyarakat Muslim untuk menghindari pengalaman negara-negara lain yang melakukan kesalahan dengan menolak atau mengkesampingkan tulisan-tulisan, penemuan, pengalaman atau kontribusi peradaban yang muncul dari non-Muslim. ia lebih lanjut menyerukan diakhirinya kekuasaan absolut, yang menyebabkan penindasan bangsa muslim oleh bangsa lain dan hancurnya peradaban Islam<sup>8</sup>. Al-Tunisi percaya bahwa:

*... kindling the Ummah's potential liberty through the adoption of sound administrative procedures, and enabling it to have a say in political affairs, would put it on a faster track toward civilization, would limit the rule of despotism, and would stop the influx of European civilization that is sweeping every thing along its path.*<sup>9</sup>

Tentang penyebab kemunduran di dunia Islam, Jamal al-din al-Afghâni (1838-1897) berpendapat bahwa itu terjadi karena tidak adanya al-'adl (keadilan), *shura* (dewan) dan kepatuhan pemerintah terhadap konstitusi<sup>10</sup>. Seseorang harus diberikan peran di bidang sosial politik dengan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui *shura* dan pemilu<sup>11</sup>. Al-Afghâni mengkaitkan kemunduran umat Islam dengan model pemerintahan yang despotisme sebagai salah satu alasan mengapa pemikir di negara-negara muslim di Timur (Orient) tidak bisa mencerahkan masyarakat tentang esensi dan keutamaan pemerintah republik.

*For those governed by the republican government, it is a source of happiness and pride. Those governed by a republican form of government alone deserve to be called human; for a true human being is only subdued by a true law that is based on the foundations of justice and that is designed to govern*

<sup>8</sup> Ahmad Sudqi al-Dajani, 'Tatawur Mafahim al-Dimuqratiyah .... 123

<sup>9</sup> Khayr al-din al-Tunisi, *Aqwam al-Masalik Fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1972), 185

<sup>10</sup> Ahmad Sudqi al-Dajani, 'Tatawur Mafahim al-Dimuqratiyah .... 123

<sup>11</sup> Sayyid Rifa'at Ahmad, *Al-Din Wa al-Dawlah Wa al-Thawrah* (Religion, State and Revolution). (Cairo: al-Dar al-Sharqiyah, 1989), 44-47

*man's moves, actions, transactions and relations with others in a manner that elevates him to the pinnacle of true happiness.*<sup>12</sup>

Menurut al-Afghâni, pemerintahan republik adalah '*restricted government*', sebuah pemerintah yang bertanggung jawab kepada publik dan menjadi antitesis dari pemerintahan absolut. Sebuah pemerintahan yang bebas dari despotisme dan mengangkat harkat martabat menuju masyarakat yang madani<sup>13</sup>. Namun, Jamal al-din al-Afghâni memperingatkan terhadap usaha reformasi yang mengesampingkan 'Islam fundamental' dan mengkritik orang-orang yang meniru bangsa Eropa tanpa filterisasi, bahkan menyatakan hal itu sebagai suatu ancaman terhadap persatuan umat.

Salah seorang murid al-Afghâni, Muhammad Abduh (1849-1905), mengakui bahwa hubungan Islam dengan modernisme adalah isu yang paling penting pada masyarakat muslim. Ia mencoba untuk menyesuaikan pemikiran Islam dengan pemikiran Barat; ia mengusulkan bahwa *maşlahab* (kepentingan) dalam pemikiran Islam hampir sama dengan *manfa'ab* (*utilitas*) di pemikiran Barat. Demikian pula, ia menyamakan *shura* dengan demokrasi serta menyamakan *ijma'* dengan konsensus. Abduh menolak keberadaan teokrasi dalam Islam dan menyatakan bahwa otoritas pemerintah berada di tangan hakim (Gubernur), qodli dan mufti. Ia sangat menginginkan pintu ijtihad dibukakan kembali untuk menjawab permasalahan dan pemikiran modernisasi Islam yang muncul<sup>14</sup>. Ia juga mendukung sistem parlementer dan membela pluralisme serta membantah anggapan bahwa sistem ini akan merusak kesatuan umat. Argumentasi yang disampaikan oleh Abduh, bahwa negara-negara Eropa tidak terpecah belah oleh sistem tersebut. Kita satu tujuan, meski cara pencapaiannya berbeda, pungkasnya.<sup>15</sup>

Penafsiran atau pendapat al-Afghâni tersebut lebih maju dari Abduh. Islam dalam pemahaman Abduh, tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan

<sup>12</sup> Jamal al-din al-Afghâni, 'Al-Hukumah al-Istibdadiah', 1982 (The Despotie Government), in Abdul basit Hasan, *Jamal al-din al-Afghani* (Biography of al-Afghani). Cairo. (First published in *Misir* journal, 14 February 1879.), 267-268

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Sayyid Rifa'at Ahmad, *Al-Din Wa al-Dawlah Wa al-Thawrah* ..... 44-47

<sup>15</sup> Faruq Abd al-Salam, *Al-Abḥab al-Siyasiyah Fi al-Islam* (Political Parties in Islam). (Cairo: Qalyub Publishing House, 1978), 28

kebebasan berpikir.<sup>16</sup> Ini mengandung makna, bahwa apa pun bentuk pemerintahan, Abdul menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis, tidak kaku. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian, tentu saja, implikasi dari konsepnya tentang manusia secara teologis, bahwa manusia punya kebebasan memilih dalam berkehendak dan berbuat.

Sementara itu, di Syria, Abdurrahman al-Kawakibi (1849-1903) juga berjuang melawan kekuasaan otoriter Ottoman. Ia menulis buku tentang *Ṭaba'i' al-Istibdâd* (*The Characteristics of Tyranny or despotism*). Buku ini didedikasikan untuk mendefinisikan despotisme dan variannya dengan memfokuskan pada diskusi tentang politik despotisme. Al-Kawakibi membahas hubungan antara agama dengan despotisme, juga tentang apa yang ia sebut '*inseparable tie*' antara politik dan agama. Sembari ia menekankan bahwa Islam tidak bertanggung jawab terhadap bentuk pemerintahan dispotik atau penguasa yang menggunakan sistem ini, ia menyimpulkan bahwa:

*God, the Omni-wise, has intended nations to be responsible for the actions of those whom they choose to be governed by. When a nation fails in its duty, God causes it to be subdued by another nation that will govern it, just as happens in a court of law when a minor or an incompetent is put under the care of a guardian. When, on the other hand, a nation matures and appreciates the value of liberty, it will restore its might, and this is only fair.*<sup>17</sup>

Buku ini merupakan upaya penjelasan sebab kemunduran umat Islam dan penaklukkan negara-negara Islam oleh kolonialisme pada abad ke-19.

Muhammad Rashid Riḍa (1865-1935), seorang murid dan teman dekat Muhammad Abdul yang mengkolaborasi antara gerakan reformasi al-Afghâni dan Abdul dengan gerakan revivalisme kelompok Wahabi di Saudi Arabia. Menurutnya, penyebab keterbelakangan umat Islam, karena mereka meninggalkan kebenaran agama mereka. Ajaran agama Islam yang benar meliputi dua hal: *tawhid* (keyakinan akan keesaan Tuhan) dan *shura* (dewan) dalam hal urusan negara. Tapi penguasa yang dispotik telah mencoba untuk

---

<sup>16</sup> Ahmad Abd al- 'Athi Muhammad, *Al- Fikr al-Siyasi li Imam Muhammad Abdul*, (Mesir, al-Haiat al-Mishriyat al-'Aâmmat, lil Kitab, 1978), 149

<sup>17</sup> A. al- Kawakibi, *Ṭaba'i' al-Istibda@d* (Characteristics of Despotism). (Algiers: Mofam, 1988), 187

membuat umat Islam lupa kedua hal tersebut dengan mendorong mereka untuk meninggalkan yang pertama. Tetapi, berbeda dengan Ibnu Abd al-Wahhab, Riḍa menyadari pengaruh bangsa Eropa terhadap umat Islam. Ia pun bersemangat untuk menghindari pengaruh negatif westernisasi, ia menekankan bahwa pelajaran berharga dari bangsa Eropa adalah pengetahuan tentang sebuah sistem pemerintahan.<sup>18</sup>

Dalam bukunya *Al-Khilafah*. Riḍa menegaskan bahwa agama Islam adalah sebuah pedoman, rahmat dari Tuhan dan sebuah tatanan sosial-kemasyarakatan. Ia mengungkapkan:

*As for the socio-civic policy, Islam has laid its foundations and set forth its rules, and has sanctioned the exertion of opinion and the pursuit of ijtihad in matters related to it because it changes with time and place and develops as architecture and all other aspects of knowledge develop. Its foundations include the principles that authority belongs to the Ummah, that decision making is through shura, that government is a form of republic, that the ruler should not be favored in a court of law to the layman – for he is only employed to implement Shari'ah and the will of the people, and that the purpose of this policy is to preserve religion and serve the interests of the public.<sup>19</sup>*

### **Dari elitisme menuju populisme**

Hasan al-Banna (1906-1949), merupakan seorang pengikut Rashid Riḍa. Pendiri organisasi al-Ikhwân al-Muslimûn yang mencetuskan ide gerakan 'salafisme' ala Hasan al-Banna yang menggabungkan antara ajaran Wahabisme dan Sufism. Al-Banna terinspirasi oleh pemikiran Rashid Riḍa yang mengkolaborasikan ajaran Wahabi dan pemikiran al-Afghâni. Gerakan ini berperan dalam mempengaruhi kebangkitan Islam di seluruh dunia.

Al-Banna lahir di Mahmudiyah dekat Alexandria, sejak masa muda dan seterusnya, ia bergabung dengan tarekat *Sûfi Al-Ḥaṣāfiyah* bersama temannya Ahmad al-Sukkari. Setelah mengikuti pelatihan guru di Damanhur '(1923-1927) ia pergi ke Da@r al-Ulu@m di Kairo, perguruan tinggi yang didirikan oleh Muhammad Abduh dan menjadi perguruan tinggi terkenal setelah Muhammad Rashid Riḍa mengajar di sana sampai kematiannya pada tahun 1935.

---

<sup>18</sup> Ahmad Sudqi al- Dajani, 'Tatawur Mafahim al-Dimuqratiyah .... 124-125

<sup>19</sup> M. Rashid Rida, *Al-Khilafah* (The Caliphate). (Cairo: al-Zahra Publications, 1988), 9

Saat menjadi mahasiswa, ia membaca karya Spengler, Spencer dan Toynbee yang menjadikan al-Banna banyak bersinggungan dengan pemikiran bangsa Eropa. Pada September 1927, ia mulai mengajar di sebuah sekolah dasar di Isma'iliyah, dekat asrama tentara Inggris. Sambil mengajar ia menulis untuk majalah Al-Fath di Kairo dan melanjutkan hubungannya dengan Rida di kelompok al-Maktabah al-Salafiyah sambil menjadi editor jurnal ilmiah Al-Manar dari tahun 1939-1941.

Pada Maret 1928, al-Banna bersama enam temannya mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk menebarkan kebaikan dan melawan kejahatan, organisasi ini adalah cabang kelompok tarekat *Sāfi Al-Hasāfiyah*. Organisasi ini berubah nama menjadi Jam'iyat al-Ikhwân al-Muslimûn (*Society of the Muslim Brothers*) Pada tahun 1929.<sup>20</sup>

Pada mulanya, organisasi ini sangat menarik perhatian kaum *grassroot* yang serba kekurangan, tetapi lambat laun gerakan ini menyebar juga ke kalangan kaum intelektual dan beberapa pemimpin yang berpengaruh. Al-Banna sendiri bukan hanya seorang orator ulung, tetapi juga seorang organisator yang berhasil.<sup>21</sup>

Gerakan organisasi ini dimulai dari Provinsi Isma'iliyah, kemudian kantor pusatnya pindah ke kota Kairo dan berkembang ke sebagian besar daerah di Mesir. Pada akhir tahun 1940-an, jumlah cabang telah mencapai 3000 buah yang mempunyai banyak sekali anggota. Kemudian menyebar dan tertanam kuat di negeri-negeri Arab di Sekitar Mesir, seperti Syiria, Palestina, Yordania, Libanon, Irak, Yaman, Sudan dan lain-lain. Gerakan ini juga mempunyai banyak sekali pengikut di berbagai belahan pelosok dunia. Tujuan gerakan yang dilancarkan oleh al-Banna yaitu; pertama membebaskan negara Islam dari penguasa asing. Kedua, mendirikan negara Islam yang bebas melaksanakan hukum Islam<sup>22</sup>.

Sistem partai adalah sistem pemerintahan yang paling ditentang Al-Banna dalam pemikiran-pemikirannya, karena ia beranggapan bahwa adanya sistem kepartaian, terutama yang membuka kesempatan

---

<sup>20</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 7-12

<sup>21</sup> George Lenczowski, *Timur Tengah di Kancab Dunia*, terj. Asgar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), 309.

<sup>22</sup> Syaikh Mushthafa Mansyhur, *Fiqh Dakwah Jilid 1*, ( Jakarta: Al-I'tishom, 2000), 222.

kemunculan multi partai, hanya akan memunculkan pertentangan dan perpecahan di masyarakat<sup>23</sup>. Menurut al-Banna, perpecahan dan perselisihan menyebabkan umat Islam tidak sanggup menghadapi ancaman kolonial Inggris. Ia menekankan pentingnya persatuan umat untuk menggalang kekuatan dan meyakini bahwa partai politik merupakan ancaman terhadap kesatuan umat.

Pemikir Islam telah memiliki analisis yang berbeda untuk alasan sebenarnya dibalik penolakan al-Banna terhadap pluralisme politik. Beberapa pengamat menghubungkan ini dengan maraknya tindak korupsi dan ketidak setiaan para pimpinan partai politik di waktu itu. Selain itu, pada tahun 1930 adalah tahun ketika gerakan liberal terpengaruh dengan sistem partai tunggal. Fasisme dianggap sebagai model pembebasan yang paling dikagumi.<sup>24</sup>

### **Reaksi terhadap Nasionalis Sekuler**

Tiga tahun setelah pembunuhan al-Banna pada tahun 1949, Pemerintahan dengan sistem partai tunggal berkuasa di Mesir. Perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme bangsa Eropa berakhir dengan terbentuknya negara-negara teritorial. Tetapi, bentuk republik dispotik atau monarki absolut banyak menggantikan penguasa kolonial di sebagian besar negara-negara Arab yang baru dibentuk.

Sepanjang era pasca-kemerdekaan, tradisi dan peradaban Islam berada di bawah serangan modernisasi. Universitas al-Azhar di Mesir berubah menjadi universitas sekuler, Institut al Zaytouna di Tunisia ditutup, nasionalisasi lembaga wakaf, pengadilan *shariah* dibubarkan, partai politik dan organisasi non-pemerintah dilarang atau dicekal.

Al-Ikhwân al-Muslimûn, yang sudah mempunyai banyak cabang atau jaringan yang kuat di banyak negara Arab, ikut mendapatkan tekanan dari rezim Nasser di Mesir setelah ia berkuasa pada tahun 1952. Penangkapan beberapa pemimpin, serta ratusan pengikut yang di masukkan penjara pada tahun 1954, memaksa mereka melakukan gerakan bawah tanah. Perjuangan Al-Ikhwân al-Muslimûn yang pada mulanya melawan penindasan kolonialisme pun beralih ke perjuangan untuk menentang tekanan dari rezim penguasa

---

<sup>23</sup> Hasan Al-Banna , *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid I*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 260

<sup>24</sup> Opini ini disampaikan oleh Rachid Ghannouchi dan telah dikutip oleh Tamimi dalam bukunya yang berjudul Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism. (New York: Oxford University Press, 2001)

yang ditujukan terhadap kelompok Islam ini. Sejak saat itu hingga awal 1970-an, afiliasi dari gerakan-gerakan Islam di teritorial Arab banyak dipengaruhi oleh karya-karya al-Maududi dan Sayyid Qutb.

Sayyid Qutb (1906-1966), yang dipenjara selama 10 tahun pada tahun 1954 dan kemudian dieksekusi pada tahun 1966, bergabung dengan al-Ikhwân al-Muslimûn di Mesir setelah terbunuhnya Hasan al-Banna.

Sebelum ketenarannya sebagai seorang pimpinan di Ikhwân , Qutb adalah kritikus sastra terkenal, novelis dan penyair. Sebagian besar tulisannya berbentuk fiksi, kritik sastra dan puisi. Pada mulanya ia termasuk dalam lingkaran kelompok Taha Hussein, Abbas al-'Aqqad dan Ahmad al-Zayyat, ke-tiganya modernis yang banyak mempengaruhi pemikiran Qutb. Tapi di kemudian hari, Qutb berbalik menyerang al-'Aqqad dan Taha Hussein.

Pada tahun 1948, Qutb dikirim oleh kementerian pemerintah, melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat untuk belajar metode pendidikan barat di perguruan tinggi Wilson's Teacher's selama tiga tahun hingga 1950. Dalam perjalanan pulang dari AS ia berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia, tiba kembali di kampung halaman pada tahun 1951. Pengalamannya di AS mampu membentuk pribadinya yang awalnya mengemari sastra dan pendidikan untuk intens dalam kajian agama. Tanpa menyangkal Amerika di bidang kemajuan ilmu pengetahuan, ia tidak menyukai rasisme, *free sex*, liberalisme dan prozisionisme. Namun, sekembalinya ke kampung halaman, ia menolak untuk bekerja dan promosi karir di Departemen Pendidikan. Sebaliknya, ia mulai menulis artikel untuk dipublikasi pada isu-isu masyarakat dan politik.

Setelah bergabung dengan Ikhwân , ia diangkat sebagai editor media Al-Ikhwân al-Muslimûn pada tahun 1953 untuk kemudian menjadi direktur di Media tersebut. Setelah itu, ia menjadi anggota Dewan bimbingan dan Komite Eksekutif, dua badan tertinggi di organisasi Al-Ikhwân al-Muslimûn. Angin perubahan bertiup ketika perselisihan meletus antara Ikhwan dan penguasa Mesir, Gamal Abd al-Nasser. Ikhwân mengutuk perjanjian pemberian hak kepada pemerintah Inggris untuk mendudukkan kembali pasukannya di Mesir selama tujuh tahun. Mereka pun menuntut pencabutan perjanjian tersebut, yang menimbulkan ketidaksenangan pihak pemerintah.

Oleh karena itu, semenjak adanya upaya percobaan pembunuhan terhadap Nasser, pada tahun 1954, Nasser

mengilegalkan gerakan Ikhwan dan memenjarakan para anggotanya, Qutb termasuk salah satu diantaranya. Nasser sesungguhnya adalah seorang yang muslim yang tulus tetapi menginginkan agama dan politik terpisah, bahkan ia mencoba membentuk sistem pemerintahan ala Barat. Hal inilah yang membuat jijik kalangan Ikhwan dan mungkin juga oleh golongan Islam radikal lainnya.<sup>25</sup>

Qutb awalnya dipenjara selama tiga bulan pada tahun 1954. Kemudian dihukum 15 tahun, meski sebagian besar ia habiskan di rumah sakit. Saat di penjara ia menyaksikan penganiayaan terhadap rekan-rekannya. Pada tahun 1957, penembakan 10 orang rekannya hingga tewas oleh sipir penjara, menjadikan ia berpikir dan berkeyakinan bahwa Ikhwân memiliki hak untuk menggunakan kekerasan menentang kekerasan pemerintah. Qutb dibebaskan dari penjara di 1964. Setelah permohonan banding grasi oleh Presiden Irak A. Arif diterima, kemudian ditahan kembali pada bulan Agustus 1965 karena tuduhan terorisme.

Meskipun Qutb tidak secara eksplisit menganjurkan penggunaan kekerasan untuk menggulingkan rezim pemerintah dan merebut kekuasaan, para muridnya telah mengklaim teori tersebut untuk mengekspresikan keyakinan dalam penggunaan kekerasan terhadap otoritas/pemerintah yang memaksakan hukum non-Islam pada masyarakat Islam. Menurut mereka, demokrasi dianggap asing dan tidak Islami.

Faham radikal ini pertama kali digagas oleh kelompok pemuda anggota yang selama di penjara, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada bentuk perdamaian jika berhadapan dengan penguasa jahiliyah. Sebagai reaksi terhadap penahanan, penyiksaan dan penangkapan para aktivis Islam di Mesir dan memperjuangkan tentang apa yang mereka sebut pemurnian ajaran Islam. Mereka menolak demokrasi karena dianggap asing dan tidak Islami. Penolakan tersebut didasarkan pada ajaran Sayyid Qutb yang telah ditulis dalam buku *Ma'âlim fî al-Ṭarîq* (dialih bahasa ke bahasa Inggris sebagai Milestones).

Kelompok-kelompok yang tumbuh dari faham radikal ini menentang keras, bahkan memusuhi demokrasi, atas dasar demokrasi bertentangan dengan Islam dengan mengingat kelakuan bangsa Barat terhadap umat Muslim. Mereka melihat demokrasi sebagai sebuah

---

<sup>25</sup> Karen Armstrong, *Perang Suci: Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, terj. Hikmat Darmawan, (Jakarta: Serambi, 2003), 507

ideologi, ‘agama lain’ atau pandangan dunia yang menimbulkan ancaman terbesar bagi keimanan umat Islam.

Ayman al-Zawahiri, mantan ideolog dari faksi Jihad di Mesir dan saat ini menjadi pimpinan kelompok al-Qaeda<sup>26</sup>, menyebarkan gagasan bahwa demokrasi adalah *al-shirku bi-allah*<sup>27</sup>. Ia memahami tauhid (Monoteisme) sebagai keyakinan dengan undang-undang tertinggi adalah hak prerogatif Tuhan, sebuah prinsip yang menurutnya adalah kebalikan semangat demokrasi, yang memerlukan aturan dari rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu, demokrasi adalah shirik karena merampas hak legislasi dari Tuhan yang maha kuasa dan menempatkan di tangan manusia. al-Zawahiri mengecam Vdemokrasi sebagai ‘agama’ baru yang mendewakan manusia dengan memberi mereka hak untuk membuat undang-undang tanpa terikat oleh otoritas Tuhan. Dengan demikian, berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat apa pun adalah haram (dilarang) dan orang-orang yang melakukan itu adalah murtad dan kafir.

Demikian pula, Hizb al-Tahrir al-Islami (HT)<sup>28</sup> mempercayai bahwa demokrasi adalah nizam al-kufr (sistem penghujatan). HT secara tegas menolak demokrasi. Mereka menyatakan bahwa demokrasi yang diagungkan di Barat yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada suara mayoritas adalah sistem kafir, tidak ada hubungannya dengan Islam. Demokrasi sangat bertentangan dengan Islam, baik dari sisi akidah, azas yang digunakan maupun aturan yang dibawanya. Demokrasi pada hakikatnya adalah ide sekuler yang

---

<sup>26</sup> Al-Qaeda adalah keturunan lain dari dari perkawinan Wahabi – al-Ikhwan al-Muslimun, yang jelas terlihat dari para wahabi-saudi Arabia yang dipimpin Osama bin Laden (murid Sayyid Muhammad Qutb) dan Ayman al-Zawahiri bersama para pengikutnya. Al-Zawahiri yang telah menjadi anggota al-Ikhwan al-Muslimun sejak berusia 14 tahun sangat kuat dipengaruhi oleh sayyid Qutb. Lih. Abdurrahman Wahid (editor), *Ilusi Negara Islam*, (Jakarta: Wahid Institute, 2009), 84

<sup>27</sup> Ayman al-Zawahiri, *Al-Hasad al-Murr, al-Ikhwan al-Muslimun Fi Sittin 'Aman* (The Bitter Harvest, the Muslim Brotherhood in Sixty Years). n.p.: Jihad Group Publication

<sup>28</sup> Mengaku kecewa dengan al-Ikhwanul al-muslimun yang dituding terlalu moderat dan terlalu akomodatif terhadap Barat, taqiuddin an-Nabhani mendirikan hizb al-tahrir pada tahun 1952 di Yerusalem Timur yang dikuasai Yordania. Menurut an-Nabhani, umat Islam-ketika itu-sudah dicemari oleh pikiran kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan sektarianisme. Karena itu ia berambisi untuk mendirikan khilafah Islamiyah internasional yang diawali dari teritorial Arab dan kemudian meluas ke teritorial non-Arab. Lih. Zeyno Baran, *Hizb al-Tabrir: Islam Political's Insurgency*, (Washington: Nixon Center, 2004), 16-17.

memisahkan agama dari negara dan merupakan ide dasar kapitalisme.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, umat Islam haram untuk mengadopsinya. Selain menekankan bahwa demokrasi berasal dari ideologi yang tidak dapat diterima oleh agama dan masyarakat umum, HT berpendapat bahwa demokrasi telah gagal untuk mencapai tujuan seperti yang dikampanyekan para pendukungnya.

### **Kajian Demokrasi di Islam**

Gerakan-gerakan kelompok mainstream Islam di negara-negara teritorial Arab sepanjang tahun 1980 dan 1990-an membuat kalangan intelektual memposisikan vis-a-vis antara demokrasi dan pluralisme politik dengan pembacaan ulang pemikiran Sayyid Qutb. Proses ini bersamaan dengan usaha pemerintah di negara-negara Arab menuju politik parsial dan liberalisasi ekonomi.

Transformasi dalam pemikiran Islam dipicu oleh migrasi sekelompok pemikir terkemuka bangsa Arab dari haluan kiri dan nasionalis ke haluan Islam pasca kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967. Beberapa nama terbesar dalam pemikiran politik Islam kontemporer, seperti sebagai Tariq al-Bishri, Muhammad Amarah, Abdul Wahhab Elmessiri, Rachid al-Ghannouchi dan Munir Shafiq, untuk beberapa nama, telah menjadi Arab nasionalis atau Marxis. Anggota dari kelompok ini umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya Barat dan pemikiran politik Eropa dari pengkaji Islami yang telah menerima pendidikan secara eksklusif berorientasi Islam. Mereka telah mengenal kritik modernitas Eropa dengan baik, mereka juga menggunakan pisau analisis yang obyektif untuk membedakan sisi negatif dan positif dan membedakan ideologi dan prosedur.

Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh yang pernah dimiliki Islam adalah Malik Bennabi (1905-1973)<sup>30</sup>. Ia dipercaya telah

---

<sup>29</sup> Abdul Qwadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, HTI.tt. hal . 1 – 15.

<sup>30</sup> Malik Bennabi lahir pada tahun 1905 di Kota Constantine, Aljazair Timur. Beliau berasal dari keluarga Muslim imigran dan ibunya dari wilayah Tripoli-Libya. Beliau menghabiskan zaman

kanak-kanak hingga remaja di Tabessa, sebuah kota yang pada saat itu sedang tumbuh kesadaran bagi masyarakatnya terhadap membina rancangan masa depan. Sementara ayahnya hanyalah tamat dari Sekolah Menengah bernama Al-Madrasah al-Rasmiyyah dan bekerja di Mixid Commune Local. Lih. Fawzia Bariun, *Malik Bennabi Sosiolog Muslim Masa Kini*. (Indonesia:

meletakkan dasar-dasar pemikiran kontemporer tentang demokrasi Islam, Bennabi, seorang pemikir Aljazair yang terpengaruh budaya Perancis, meyakini bahwa kedatangan Eropa memberikan peluang bagi umat Islam untuk melarikan diri dari keterbelakangan - yang disebabkan ketidakmampuan berfikir secara rasional dan dekadensi moral, dengan memecah kejumudan sosial dan membebaskan mereka dari kepercayaan kekuatan gaib dan khayalan.

Dari awal tahun 1950 sampai kematiannya, Bennabi menulis dan memberikan kuliah tentang isu-isu besar: peradaban, budaya, orientalis dan demokrasi. Dalam perkuliahan berjudul *Democracy in Islam* dengan bahasa Prancis di Maghreb Students Club pada tahun 1960 ia berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada demokrasi dalam Islam? Ia menunjukkan bahwa mendefinisikan konsep Islam dan demokrasi dengan cara konvensional yang terkungkung oleh setting waktu dan tempat, akan menyebabkan pada kesimpulan bahwa koneksi antara keduanya adalah tidak ada. Ia menyarankan untuk mendekonstruksi konsep demokrasi yang terisolasi oleh konotasi sejarah. Dan, mendefinisikan demokrasi secara lebih luas, tanpa derivasi linguistik dan bebas dari implikasi ideologis, sehingga akan mengarah pada kesimpulan yang berbeda.

Demokrasi seharusnya dilihat dari tiga aspek: Pertama, demokrasi sebagai kepentingan diri sendiri, kedua, demokrasi sebagai kepentingan yang lain, dan ketiga, demokrasi sebagai kombinasi dari kondisi sosial-politik yang diperlukan untuk pembentukan dan pengembangan individu.

Itulah sebabnya ia sangat percaya bahwa demokrasi harus diberikan melalui jalur pendidikan bagi seluruh masyarakat, dengan kurikulum yang komprehensif yang mencakup aspek psikologi, etika, sosial dan politik. Bennabi percaya, bahwa jika model demokrasi Islam tersebut dapat tercapai, menurutnya, akan menjadi model demokrasi yang unggul. Sebuah model Demokrasi yang mampu memberikan hak-hak politik bagi manusia yang bisa dinikmati oleh masyarakat di negara barat, atau jaminan sosial yang dinikmati di negara-negara Timur.

Berdasarkan analisis Bennabi selama masa revolusi, kebanyakan para pengkaji Islam di Arab, terutama di Timur Tengah, memusuhi demokrasi tanpa pernah mau memahami terlebih dulu. Atas usaha murid-muridnya, seperti Rachid Ghannouchi dan pemikir Afrika

---

Pustaka Bandung, 1988) 20.

Utara lainnya, akhirnya gerakan-gerakan kelompok mainstream Islam secara bertahap melupakan isu ini. Pertemuan Ghannouchi dengan Bennabi sendiri terjadi di 1960-an, ketika ia melakukan perjalanan pulang ke Tunisia dari Perancis melalui Spanyol, Maroko dan Aljazair. ia mengunjungi orang-orang yang sudah tertarik pada tulisan-tulisannya. Peran Ghannouchi pada gerakan Islam di Tunisia menjadi sebab tersebarnya demokrasi di seluruh wilayah Tunisia. Namun, ia justru mendapatkan anugerah pengasingan. Sedangkan, para pengikutnya menerima tekanan dan penganiayaan.

Berdasarkan konsep Ghannouchi<sup>31</sup>, demokrasi adalah sistem politik yang berasal dari legitimasi masyarakat. Dalam demokrasi, ia menjelaskan, orang-orang bebas memilih, mengawasi dan mengganti penguasa melalui mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang. Pada umumnya, semua bentuk demokrasi memiliki kesamaan mekanisme melalui pemilihan umum yang bebas. Demokrasi, katanya, menetapkan prinsip silih bergantinya kekuasaan melalui kotak suara, menjamin kebebasan bagi masyarakat, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan mendirikan partai politik dan melindungi independensi penegakan hukum. Demokrasi adalah mekanisme yang menjamin kedaulatan rakyat atas rezim yang berkuasa dan memberikan nilai-nilai penting perlindungan masyarakat terhadap ketidakadilan dan kez{aliman.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Tokoh yang dilahirkan di El Hamma, Gabes, selatan Tunisia pada Jun 1941, ia merupakan salah seorang tokoh pemikir Islam terkenal, seorang penulis, ahli politik, pendiri Partai En-Nahda dan salah seorang tokoh Islam yang paling menonjol di Tunisia. Setelah lulus dari Universiti Zaytuna pada tahun 1962, Ghannouchi melanjutkan kuliah di luar negeri. Ia belajar di Universitas al-Qahirah untuk belajar tentang pertanian. Pernah diasingkan bersama pelajar Tunisia lainnya pada masa pergolakan diplomatik disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Presiden Habib Bourguiba (Tunisia) dan Presiden Jamal Abdel Nasser (Mesir). Setelah itu ke Universitas Damsyik, Syria, mengambil jurusan falsafah. Ghannouchi mula membentuk orientasi politiknya sebagai mahasiswa. Walaupun kecenderungan awal ke arah sosialisme, kemudian beralih kepada ideologi agama, khususnya Islamisme. Setelah lulus pada tahun 1968, Ghannouchi melanjutkan belajar di Universitas Sorbonne. Selepas belajar di sana selama setahun, ia kembali ke Tunisia dan mendirikan sebuah organisasi untuk memulai gerakan modernis di negara tersebut.

<sup>32</sup> Penjelasan ini telah dikutip oleh Tamimi dalam bukunya yang berjudul *Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism*. (New York: Oxford University Press, 2001)

Berangkat dari teori Bennabi ini, tujuan utama Ghannouchi adalah menekankan perlunya sistem demokrasi, ia membuktikan bahwa demokrasi selaras dengan Islam dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat perkembangan demokrasi di kawasan Arab. Tantangan bagi pemikir Islam kontemporer selanjutnya adalah mengembangkan teori pemerintahan Islam berdasarkan prosedur yang demokratis. Bentuk demokrasi Islam, yang merupakan perkawinan antara sistem nilai dan etika ajaran Islam di satu sisi, dan prosedur demokrasi di sisi lain, menurut Ghannouchi, tidak hanya memecahkan masalah despotisme yang telah merajalela di negara-negara Islam tetapi juga memperbaiki kebobrokan demokrasi liberal.

Muslim, seharusnya tidak memiliki masalah dengan mekanisme yang dirancang oleh demokrasi Barat, maintainsnya memang sudah baik tapi bukan berarti tanpa ada cacat. Menurutny, masalah demokrasi liberal yang sebenarnya tidak terletak pada mekanisme, tetapi dalam kajian filosofi. Filsafat materialis yang menjelmakan mekanisme, melalui peran yang dimainkan oleh pemodal dan media, akhirnya menghasilkan pemilihan yang justru berpihak pada pemodal dan politik kekuasaan.

Menurut Ghannouchi, Islam harus berkontribusi dalam sistem demokrasi, terutama dalam bentuk etika, moralitas yang tampaknya tidak memiliki tempat dalam praktek demokrasi saat ini. Hal ini merupakan sebuah kekurangan yang transendental, ia memperingatkan, bahwa pada akhirnya demokrasi ternyata hanya menjadi *'rule of the people by the rich and powerful for the interest of the rich and the powerful'*. Ia mencontohkan pemilu di Amerika Serikat, yang menjadikan uang dan media\ memainkan peranan penting dalam memutuskan tidak hanya siapa yang menang pemilu, tetapi juga pembagian kue kekuasaan. Apa yang diberikan Islam tidak hanya seperangkat nilai-nilai untuk pendisiplinan diri dan penyempurnaan perilaku manusia, tetapi juga batasan untuk memerangi monopoli penguasa dan melindungi opini publik.

Ia optimistis, dengan mengasimilasi sistem demokrasi Barat, Islam dapat bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan, serta melestarikan aspek-aspek positif dari demokrasi. Ia menyarankan, ini dapat dicapai dengan mentransformasikan konsep *shura* di Islam, yang berarti melibatkan umat dalam pemerintahan, dari sekedar memberikan usulan belaka atau terlibat ke lembaga pemerintahan yang tepat. Ia membayangkan, tentunya ini harus sama dengan apa

yang ada di 'pikiran' Barat. Mereka mengembangkan penemuan Muslim tentang teori geometri dan aljabar, sehingga menjadi teknologi mengagumkan-yang mencirikan kegeniusan orang Barat dan revolusi ilmiah.

Sampai pada masa hancurnya demokrasi di Aljazair, dengan meletusnya pertumpahan darah yang sejauh ini telah membunuh lebih dari 100.000 korban, gerakan-gerakan Islam di seluruh negara yang berbahasa Arab dengan penuh semangat menganut sistem demokratis. Untuk beberapa kalangan, ini adalah pilihan yang paling tepat untuk dilakukan agar mereka menuai buah demokratisasi.

Namun, pada akhir 1990-an terjadi erosi yang menggerus semangat demokratisasi di kalangan gerakan Islam, meskipun sebagian besar masih mengambil peranan di dunia politik. Kekecewaan yang tergantikan dengan semangat ber-demokrasi hanya berlaku sampai akhir tahun 1980-an, saat negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menunggu angin demokrasi yang bertiup di seluruh dunia. Negara-negara muslim Arab justru tertimpa angin ribut yang berhembus seiring semakin kuatnya kediktatoran yang ada di seluruh teritorial negara-negara muslim Arab.

Ternyata demokrasi melalui pemilihan umum yang berlangsung bebas, akuntabel, transparan, menjunjung supremasi hukum dan memberikan perlindungan hak asasi manusia, adalah buah terlarang di negeri-negeri Islam.

### **Catatan Akhir**

Diskusi panjang tulisan Azzam Tamimi tentang hubungan Islam dan demokrasi, dengan pendekatan historis membawa ke suatu kesimpulan. Dalam tradisi Islam, setidaknya dikenal dua varian besar, yaitu kelompok fundamentalis dan modernis. Kelompok fundamentalis pada umumnya lebih kaku ketika mengadaptasi demokrasi ke dalam Islam, bahkan bergeser ke arah radikalisme; sementara kelompok modernis lebih adaptatif dalam menerima wacana demokrasi.

Namun demikian, hasil diskusi di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa konsep-konsep yang dibincangkan oleh para tokoh. Sejak era Tahtawi hingga Gannouchi mempunyai signifikansi yang tersendiri dalam sumbangsih wacana antara Islam dan demokrasi. Konsep-konsep tersebut secara jelas telah memberi sumbangan atau input dalam menghubungkan antara Islam dan demokrasi. Meskipun, beberapa tokoh terkesan mengambil langkah

berhati-hati dalam menjelaskan ide-idenya, supaya tidak terikut dengan pemikiran demokrasi Barat yang agak bebas.

### Daftar Rujukan

- Abd al-Salam, Faruq, *Al-Abzab al-Siyasiyah Fi al-Islam* (Political Parties in Islam). Cairo: Qalyub Publishing House, 1978.
- Afghani, Jamal al-din al- (1982) 'Al-Hukumah al-Istibdadiyah' (The Despotic Government), in Abdulbasit Hasan, Jamal al-din al-Afghani (Biography of al- Afghani). Cairo. First published in Misr journal, 14 February 1879.
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Ahmad, Rifa'at Sayyid, *Al-Din Wa al-Dawlah Wa al-Thawrah* (Religion, State and Revolution). Cairo: al-Dar al-Sharqiyah, 1989.
- Al-Banna, Hasan, *Mudhakkarat al-Da'wah wa al-Da'iyah* (Memoirs of the Mission and the Missionary Autobiography). Cairo: Dar al-Shihab, 1966.
- Armstrong, Karen, *Perang Suci: Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, terj. Hikmat Darmawan, Jakarta: Serambi, 2003.
- Bennabi, Malik, *Al-Qadaya al-Kubra* (The Grand Issues). Beirut: Dar al-Fikr. Dajani, Ahmad Sudqi al- (1984) 'Tatawur Mafahim al-Dimuqratiyah Fi al-Fikr al-'Arabi al-Hadith' (The Development of the Concepts of Democracy in the Modern Arab Thought), in *Azmat al-Dimuqratiyah Fi al-Watan al-'Arabi* (The Crisis of Democracy in the Arab Homeland). Beirut: Arab Unity Studies Centre, 1991.
- Bariun, Fawzia, *Malik Bennabi Sosiolog Muslim Masa Kini*. Indonesia:Pustaka Bandung, 1988
- Baran , Zeyno, *Hizb al-Tabrir: Islam Political's Insurgency*, Washington: Nixon Center, 2004.
- Elmessiri, Abdelwahab, 'Ma'alim al-Khitab al-Islamiy al-Jadid' (Features of New Islamic Discourse), in Azzam Tamimi (ed.) *Al-Shar'iyah al-Siyasiyah fi al-Islam Masadiruha wa Dawabituha* (Political Legitimacy in Islam its Sources and Guidelines).

- London: Liberty for Muslim World Publications, 1997.
- Hizb-ut-Tahrir (n.d.) *Al-Dimuqratiyah Nizam Kufr (Democracy is a System of Blasphemy)*.n.p.
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Kawakibi, A. al-, *Taba’i’ al-Istibdad (Characteristics of Despotism)*. Algiers: Mofam, 1988.
- Kawakibi, A. al-, *Umm-UL-Qura (Mother of Villages)*. Beirut: Dar Ash-Shuruq al-’Arabi, 1991.
- Lenczowski, George, *Timur Tengah di Kancab Dunia*, terj. Asgar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993
- Mawla, Su’ud al-, *Min Hasan al-Banna Ila Hizb al-Wasat (From Hasan al-Banna to al-Wasat Party)*. Beirut: al-Ula Foundation, 2000.
- Mitchell, Richard, *The Society of Muslim Brotherhood*. New York: Oxford University Press, 1969.
- Mansyhur, Syaikh Mushthafa, *Fiqh Dakwah Jilid 1*, Jakarta: Al-Ftishom, 2000.
- Rida, M. Rashid, *Al-Khilafah (The Caliphate)*. Cairo: al-Zahra Publications, 1988.
- Tamimi, Azzam, *Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Tunisi, Khayr al-din al-, *Aqwam al-Masalik Fi Ma’rifat Abwal al-Mamalik*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1972.
- Wahid, Abdurrahman (editor), *Ilusi Negara Islam*, Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Zawahiri, Ayman al- n.d. *Al-Hasad al-Murr, al-Ikhawn al-Muslimum Fi Sittin ’Aman (The Bitter Harvest, the Muslim Brotherhood in Sixty Years)*.
- Zallum , Abdul Qwadim, *Demokrasi Sistem Kufur*, HTI.tt.